

RESENSI BUKU

Komunikasi & Polisi; Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik

Penulis : Ilham Prisgunanto

Penerbit : Prisani Cendikia

Kota : Jakarta

Tahun : 2012

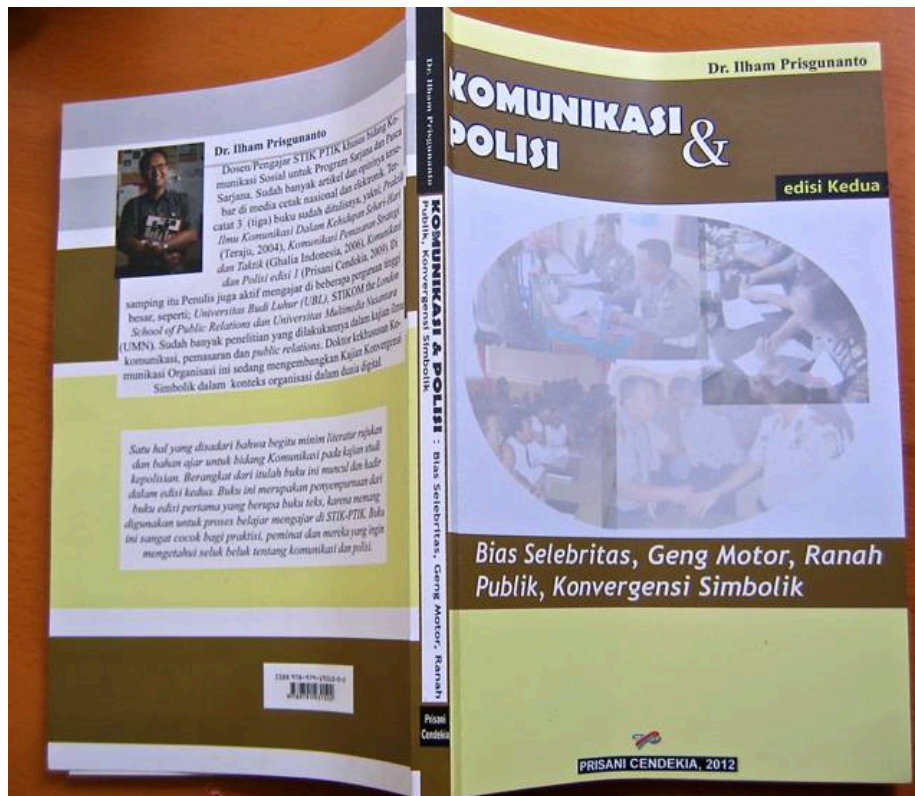
Tebal : 228 halaman

MEMAHAMI KERJA DAN TANTANGAN KEPOLISIAN MELALUI PENDEKATAN KOMUNIKASI

Oleh

ISKANDAR P. NUGRAHA

Peresensi adalah pengajar dan konsultan komunikasi/budaya Indonesia. Tinggal di Sydney, Australia. Selain menjadi editor dan peneliti juga menjadi pengajar tamu di University of Sydney dan New South Wales Australia)



Literatur mengenai studi kepolisian di Indonesia, utamanya bidang komunikasi masih amat terbatas. Pintu analisis studi terhadap aspek-aspek kepolisian secara umum pun masih banyak didominasi oleh diskursus pendekatan Barat (Amerika Serikat dan Inggris) yang akan kurang tepat diterapkan sebagai pisau analisis pemahaman sistem kepolisian Indonesia yang memiliki sejarah yang berbeda dan spesifik, sistem yang tidak desentralisasi dan sedang berkembang begitu cepatnya sejak reformasi bergulir pada 1998.

Sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri disahkan, ada perubahan penting lepasnya institusi ini dari TNI. Polri langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam urusan-urusan penegakkan hukum dan pembinaan pengamanan di Indonesia. Ini adalah suatu perkembangan kepolisian menuju babak baru sejarahnya. Munculnya babak baru pada tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa ini mengusung konsep polisi ideal sebagai kekuatan ‘non combatan,’ bukan aparatus poros kekuasaan. Hilangnya premis-premis pandangan polisi militeristik dan tidak lagi mengutamakan semangat korps ‘la esprit de corps’ yang tunduk sistem komando. Sebaliknya, peran utama polisi mengayomi dan melindungi masyarakat sipil, yang hakikatnya adalah bentuk asli polisi yang pro-rakyat dan tak lagi tunduk hanya pada atasan sebagai elemen kekuatan pro-penguasa. Profesionalitas dan ketaatan

pada hukum dan keadilan merupakan kata kunci polisi sipil ini.

Namun demikian, suatu pemahaman terhadap polisi sampai dengan sekarang ini masih jauh dari bentuk ideal cita-cita reformasi bidang keamanan. Berbagai kasus-kasus yang dihadapi polisi terutama berhadapan dengan pihak media sebagai yang paling banyak memojokkan sikap kenetralan politik polisi atau penyelewengan hukum masih fenomenon dan kerap terjadi. Habitus polisi masih identik dengan kekuasaan, korupsi, dan miskinnya *public relations* sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik/masyarakat.

Buku edisi kedua yang disempurnakan ini merupakan hasil pemikiran penulis sebagai ahli komunikasi dan pengamat masalah polisi di Indonesia dalam menyikapi persoalan dasar di atas yang ditempatkan pada konteks problematika klasik penegakan hukum secara umum. Kapasitasnya sebagai pengajar dan ahli komunikasi membawanya untuk seluas-luasnya memanfaatkan teori-teori komunikasi sebagai pisau analisis penglihatan pencerahan bagi topik dengan akses yang dimilikinya sebagai pengajar pada studi kepolisian di Indonesia.

Secara umum agenda pemberitaan pers serta pemahaman alam kognitif ranah publik Indonesia saat ini masih melontarkan anggapan miring terhadap polisi dengan pencitraan polisi yang masih mengerikan, menakutkan, dan harus dihindari. Terdapat istilah yang hidup

di masyarakat polisi sebagai kerok masalah dan bukan bagian dari penyelesaian. Posisi yang seperti ini menurut penulis semakin membuat polisi terasing dan teralienasi dari masyarakat meskipun banyak klaim-klaim tersebut tidak lagi sah.

Lebih jauh lagi alineasi polisi pada pemberitaan pers telah menyebabkan terbatasnya ruang dan gerak kerja polisi sehingga upaya menegakkan supremasi hukum sebagai syarat mutlak pelaksanaan negara demokrasi pro rakyat masih terganjal. Dicontohkannya kasus pemberitaan media massa yang arogan ketika memberitakan polisi dapat dilihat dari pemberitaan ledakan bom Bali yang beberapa tahun lalu lebih banyak menggunakan sumber militer daripada sumber yang berasal dari Polri sendiri. Rasa tanggung jawab besar seharusnya ditunjukkan pers dan pemerintah lewat upaya untuk melek terhadap media massa sehingga bisa membuat masyarakat makin bijak mengkonsumsi dan memilih sumber informasi terpercaya. Selain pokok-pokok besar diskusi menyangkut citra dan kerja Polri, polisi dalam hubungannya dengan agenda setting dan kepercayaan publik, topik-topik hangat lain yang disajikan juga menarik seperti bias selebritas, fenomena geng motor, dan elemen komunikasi pada ranah publik/konvergensi simbolik pertarungan domain digital realitas dan alam maya sebagai tantangan kompleks.

Banyak kata kunci akan ditemui pada studi ini, seperti

anarkistis kelompok, marginalisasi pers, dan fantasi narasi kisah polisi. Kekuatan ambivalensi polisi netralitas atau independensi, penyimpanan dan benturan budaya polisi sebagai pokok masalah reformasi kultural reformasi polisi juga ditulis dengan analisis masing-masing. Selain itu persoalan-persoalan tersebut dibingkai penulis dengan pendekatan komunikasi. Buruknya sikap polisi itu dibedahnya menggunakan teori Roberg dan Kuykendall (California, 1993), yakni teori kecenderungan (*predispositional theory*) dan teori sosialisasi (*socialization theory*).

Penulis menyebutkan sikap polisi demikian karena memang sudah sifat dasar anggota tidak bisa diubah. Sikap itu terbentuk dari hasil interaksi antaranggota Polri, baik dalam pergaulan sekitar, maupun antarteman sejawat. Semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat tampak pada penanganan kasus. Kejadian anggota polisi dipukuli warga ketika melakukan pengerebekan peredaran narkoba adalah indikasi negatif Polri tidak bedanya 'maling' atau kasus beredarnya film kekerasan polisi di Palu telah menyentak kognitif masyarakat tentang citra kebrutalan polisi.

Terinspirasi oleh Allen P. Bristow *Police Disaster* bahwa tingkat komando puncak (tertinggi) penanganan bencana alam pada polisi, penulis menunjukkan tidak perlunya ada ketakutan terjadinya kesemrawutan dan hilangnya hak-hak sipil pasca bencana alam (seperti pasca tsunami NAD dan Nias). Selanjutnya

menyikapi kontroversi pemberantasan kejahatan judi, penulis berargumen terdapat pertarungan budaya yang telah mengakar pada tata kultur masyarakat. Tidak saja polisi harus hati-hati menangani masalah namun juga mampu memperhitungkan potensinya menjadi bumerang yang memperburuk citra mereka sendiri.

Walau topik-topiknya begitu luas dan disajikan singkat analisis, persoalan-persoalan polisi seputar perubahan-perubahan dalam alam reformasi dan teknologi berhasil dipetakannya.

Pada bab yang membahas kerusuhan pilkada, penelitian kuantitatif diterapkan dengan pendekatan analisis isi pemberitaan model konvensional. Nara sumber dan keberpihakan pemberitaan ditengarai tidak seimbang bahkan menyudutkan kerja KPU/KPUD/Panwaslu dan juga polisi sendiri dalam konteks pelaksanaan dan pengamanannya. Potensi konflik politis berkenaan dengan pemilu menurut penulis seharusnya ditanggapi serius Polri dalam kerangka penanganan pengamanan Pemilu langsung sebagai refleksi komunikasi politik Indonesia pasca 2004. Dengan demikian preseden buruk pilkada pasti rusuh dan mengkambinghitamkan pihak pelaksana dan penyelenggara tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya, menyoal tema perpolisian masyarakat, citra dan *public relations* penulis menyebutkan program Polmas yang dijalankan Polri masih tampak minim unsur komunikasinya, menjadikannya sulit

diterapkan karena modal Polmas sesungguhnya adalah interaksi dengan masyarakat secara luwes guna meningkatkan citra Polri sendiri.

Pada bab mengenai alasan dipilihnya Indonesia sebagai medan pertempuran teroris bagian dari kejahatan trans-nasional diungkap betapa telah terjadi upaya publikasi besar-besaran media massa yang kerap memfasilitasi dan melebih-lebihkan tindakan pers sehingga tampak keberpihakan mereka pada pihak teroris. Kerja pers yang menghalang-halangi polisi dan klaim-klaim pemberitaan yang memojokkan Polri mengganggu pelaksanaan tugas mereka di lapangan. Kegerahan Polri terhadap sikap pers ini dianalisis dengan mengikuti pemahaman Robert H. Kupperman dan Darrell M. Trent dalam *Terrorism: Threat, Reality, Respon* (California, 1979).

Membaca buku ini telah menyadarkan kita betapa sulitnya menjadi polisi di Indonesia untuk bersikap profesional di tengah alam yang tengah berubah, berkaitan dengan persoalan-persoalan perkembangan teknologi informasi dan bukan paradigma lama yakni polisi yang miskin tugas. Menilai cara kerja Polri lewat riset komunikasi agenda setting tampaknya harus dikembangkan dan ditulis dengan audiens yang lebih luas. Selama ini kredit sisi positif kinerja Polri di dunia internasional baru diberikan kepada keberhasilannya secara solid dalam menangani persoalan terorisme di tengah-tengah kritik mengenai lemahnya penegakan

hukum, korupsi dan pelanggaran hak asasi.

Tampaknya titik kunci penting bagi penataan kepolisian ada pada sisi pendidikan awal polisi dan bagaimana polisi menyikapi agenda pemberitaan yang masih memojokkan gerak dan kerja polisi sebagai kekuatan penegakkan hukum. Semangat dan nafsu untuk menelanjangi, mengkritik dan mengkoreksi polisi habis-habisan dengan semangat komoditas pemberitaan oleh pers tampaknya sering mengantarkan pembaca pada 'jebakan' isu-isu miring yang menjerumuskan polisi pada kepentingan tertentu dan harus direspon dengan perbaikan komunikasi di kepolisian agar tugas baik yang diemban polisi mengangkat isu lokal, sosial dan kemasyarakatan tidak terganggu.

Walau masih perlu disajikan lebih komprehensif dan holistik terutama dari segi penyajian pembagian topik atau tema-tema yang lebih terkategori, publikasi ini jelas adalah rujukan sah bagi praktisi, mahasiswa, masyarakat umum bahkan pengamat polisi dari luar negeri karena tempatnya yang istimewa di tengah-tengah kelangkaan buku mengenai polisi di Indonesia yang *up date*, dapat dipertanggungjawabkan dan isi tak berat sebelah.

Buku yang melihat sisi-sisi menarik dan kompleks ini telah memperlihatkan bagaimana Mabes Polri telah melakukan tugasnya dengan baik dan mengarahkan cara pandang dan pendekatan kejahatan akan menyumbang diskusi mengenai

polisi Indonesia di tengah-tengah tantangannya. Oleh karenanya khusus untuk kalangan kepolisian sendiri, buku ini adalah referensi penting sebagai bahan diskusi aktif bagi penggalakkan tercapainya cita-cita ideal polisi dan institusi Polri di alam demokratisasi.

Akhirnya, munculnya publikasi edisi kedua jelas memperlihatkan popularitas dan fungsi buku yang sarat kegunaan pada literatur kepolisian. Hal ini memperlihatkan penulis yang doktor komunikasi dan memiliki akses bagi pembuatan analisis-analisisnya telah memberikan kontribusi pemikiran studi kepolisian Indonesia yang tidak kecil.

Sangat diharapkan, ketika nantinya edisi yang disempurnakan terbit lagi penulis dapat menambahkan dengan diskusi pada tema-tema baru yang dapat memperlihatkan perubahan signifikan oleh sebab gabungan proses soliditas profesionalitas dan akuntabilitas polisi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mengglobal. Misalnya, kenyataan dampak perkembangan teknologi telah terjadi revolusi besar bagaimana masyarakat menerima berita dewasa ini. Media cetak seperti surat kabar, televisi dan media vertikal lainnya yang dibahas di buku ini akan makin tergantikan dengan model komunikasi yang lebih horisontal dan dengan target audiens yang lebih spesifik bahkan untuk mereka yang rela membayar untuk berita yang berimbang. Media dan agenda setting yang ditulis di buku ini tidak terelakkan, akan makin diadaptasi oleh dunia media dengan

kemunculan dunia virtual dan internet yang bebas medium perantara. Sejauh mana hal ini mempengaruhi juga kerja kepolisian? Apakah ini kesempatan atau tantangan bagi kepolisian Indonesia? Jawabannya akan sangat berarti bagi upaya perbaikan komunikasi dan Polisi di Indonesia.